



Kemenag
Berdampak



LAPORAN KINERJA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



2025



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika dan tantangan, dimana Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dukungan administrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai inovasi dan langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Laporan ini memuat capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi aspek-aspek pengelolaan keuangan, kepegawaian sarana dan prasarana, serta dukungan teknis administrative lainnya. Selain itu, Laporan ini juga menguraikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, termasuk dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola, dan pengembangan sumber daya manusia.



Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2026

Kepala,



Ahmad Bahiej



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
E. Permasalahan Utama.....	7
F. Sistematika Pelaporan	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	10
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III. CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Capaian Kinerja Anggaran	56
C. Capaian Kinerja Lainnya	64
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	
A. PERJANJIAN KINERJA	
B. SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari SAKIP.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2025 yang mengacu pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 777 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. Dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Kementerian Agama, mengamatkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan program sepanjang tahun 2025.



Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung 18

Sasaran Kegiatan dari 7 Sasaran Strategis Kementerian Agama yaitu :

1. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama;
2. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji;
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji;
6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah;
7. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan;
8. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas;
9. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan;
10. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan;
11. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;
13. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN;



14. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);
15. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum;
16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;
17. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi;
18. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi.

Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2025 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui capaian 18 Sasaran Kegiatan dengan 76 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), capaian kinerja lainnya dan capaian pelaksanaan kinerja anggaran. Nilai Rerata Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2025 103,52% dengan kategori sangat baik atau mengalami penurunan sebesar 6,13% dari tahun 2024 yaitu sebesar 109,65%.

Untuk Sasaran Kegiatan dengan capaian kinerja tertinggi yaitu adalah sebagai berikut : Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan capaian sebesar 460% dengan kategori sangat baik telah melampaui target yaitu 13,80% dari yang sudah ditetapkan sebesar 3,00% hal tersebut mencerminkan kinerja program yang sangat efektif dalam memperluas jangkauan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah.

Selanjutnya sasaran kinerja terendah pada tahun 2025, terdapat pada Sasaran Kegiatan 10 Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir capaian



sebesar 76,71% secara umum, capaian ini mencerminkan kinerja yang cukup baik, namun belum optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi belum tercapainya target antara lain keterlambatan pemenuhan persyaratan administrasi dan angka kredit, belum optimalnya penyusunan DUPAK oleh sebagian pengawas, serta terbatasnya kesempatan mengikuti kegiatan pengembangan profesi. Selain itu, proses verifikasi dan penilaian angka kredit yang memerlukan tahapan administratif juga turut memengaruhi waktu realisasi kenaikan jenjang.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan anggaran tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh anggaran awal sebesar Rp.128.463.359.000,- menjadi Rp.115.826.684.000,- atau mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.12.636.675.000,- (penurunan 10.91%) dari anggaran awal sebelumnya. Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025, bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.127.917.259.000,- mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.12.091.575.000,- . Kenaikan anggaran disebabkan karena sebagian dari anggaran yang sebelumnya berstatus terblokir tidak seluruhnya dibuka kembali, melainkan dilakukan penyesuaian melalui mekanisme pengurangan pagu anggaran. Dengan demikian, blokir yang pada awalnya bersifat administratif dan sementara, pada akhirnya dikonversi menjadi pengurangan pagu definitif. Kondisi ini secara langsung menyebabkan total pagu anggaran Tahun 2025 menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pagu Tahun 2024. Secara umum, penurunan anggaran Tahun 2025 mencerminkan adanya kebijakan pengendalian dan efisiensi belanja negara yang bersifat struktural dan terukur.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi, setiap unit kerja pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang salah satu komponennya akuntabilitas. Guna mewujudkan akuntabilitas dimaksud, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di amanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, oleh karena itu, setiap kementerian/Lembaga harus melaporkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama pada tingkat Provinsi. Dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja.



Pelaporan dan analisis atas capaian kinerja dilakukan secara komprehensif, yang akan disajikan pada bagian akhir laporan sebagai upaya ke depan yang akan ditempuh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan dan mengakselerasi capaian kinerja di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan laporan ini untuk menggambarkan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan dukungan terhadap sasaran program selama tahun 2025, yang selanjutnya dijadikan bahan masukan dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di



provinsi;

2. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. pembinaan kerukunan umat beragama;
6. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yakni :



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari 14 Unit Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat di uraikan sebagai berikut :

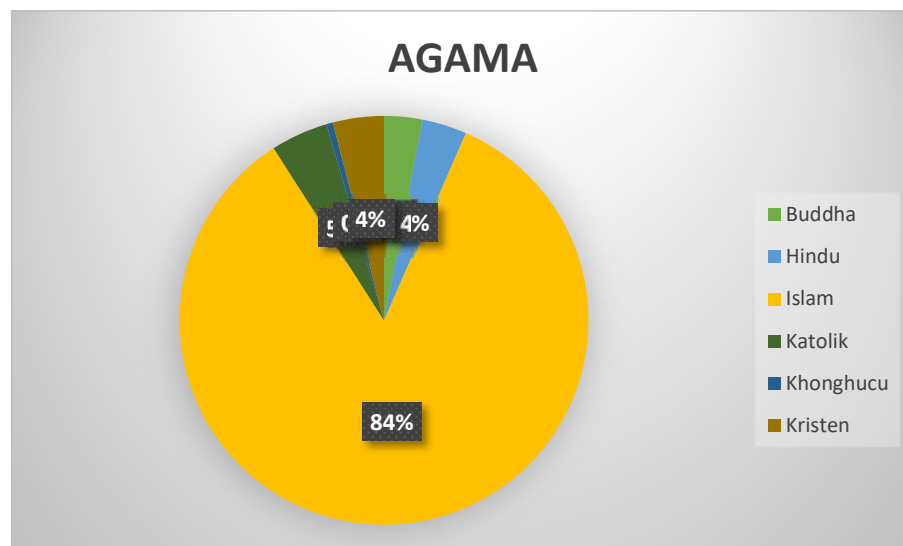
1. Bagian Tata Usaha
 - a. Tim Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 - b. Tim Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - c. Tim Kepegawaian dan Hukum;
 - d. Tim Humas, Data, Informasi dan Kerukunan Umat Beragama;
 - e. Tim Umum dan Protokol;
2. Bidang Pendidikan Madrasah;



3. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Bidang Urusan Agama Islam;
6. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
7. Pembimbing Masyarakat Kristen;
8. Pembimbing Masyarakat Katolik;
9. Pembimbing Masyarakat Hindu;
10. Pembimbing Masyarakat Buddha.

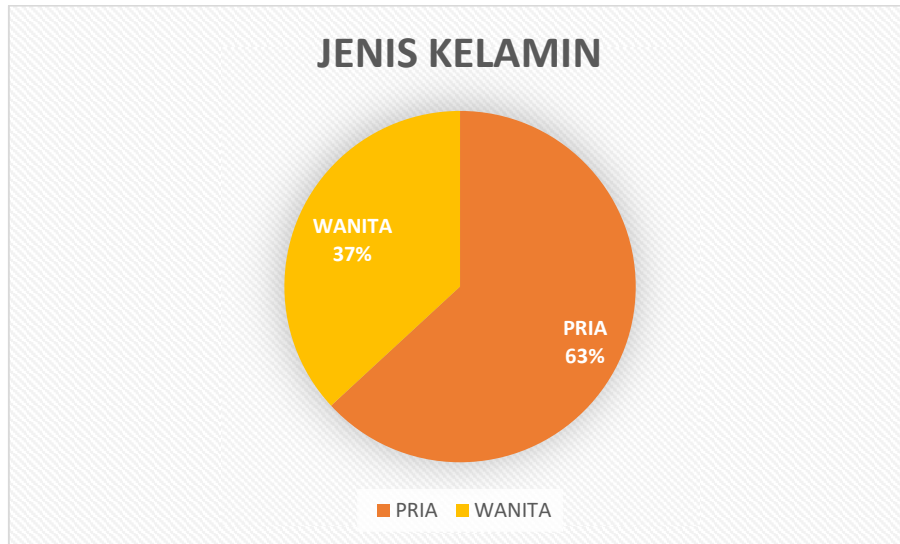
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta di dukung pegawai sebanyak 198 orang ASN yang terdiri dari :

Gambar 1a. Tampilan Grafik ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Agama





Gambar 1b. Tampilan Grafik ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Jenis Kelamin

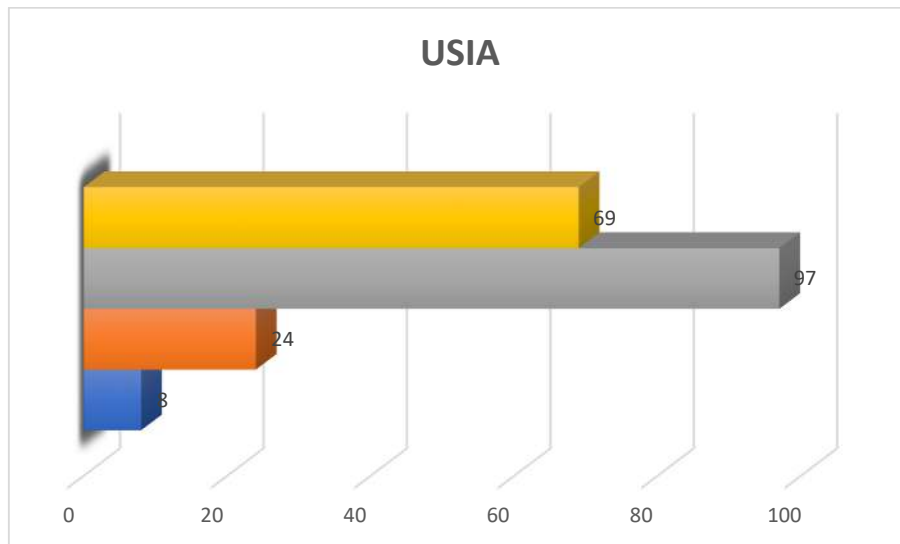


Gambar 1c. Tampilan Grafik ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pendidikan

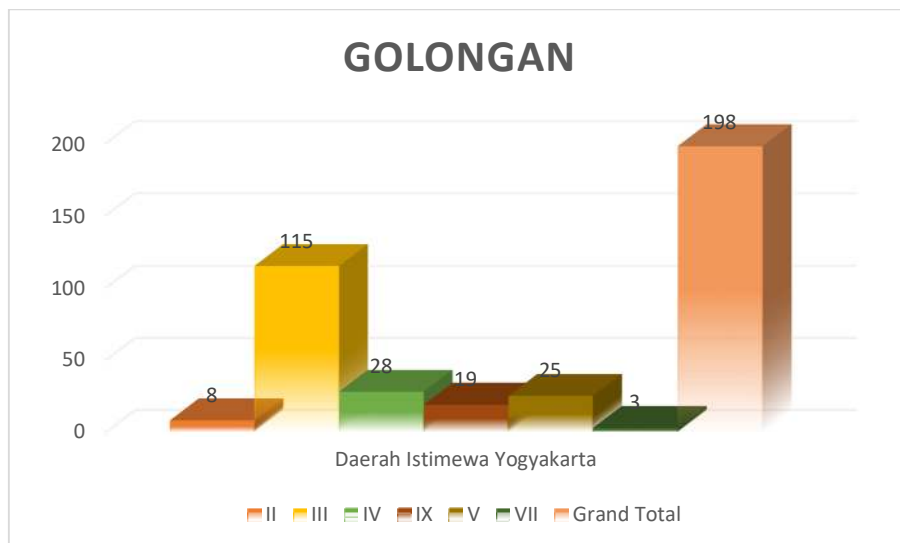




Gambar 1d. Tampilan Grafik ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Usia



Gambar 1e. Tampilan Grafik ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Golongan



E. Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan aspek strategis, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu unit kerja pada Kementerian Agama mengalami beberapa kendala atau permasalahan



untuk mengakselerasi kegiatan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan prioritas baik yang bersifat nasional maupun bersifat internal.

F. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Kementerian Agama,

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang berjalan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a) **Bagian 1, Capaian Kinerja Organisasi**, yang menguraikan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut :
- b) **Bagian 2, Capaian Kinerja Lainnya**, yang menguraikan tentang capaian kinerja monumental yang tidak terdapat dalam perjanjian kinerja dan menjadi indikator keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ; dan



- c) **Bagian 3, Capaian Anggaran**, yang menguraikan tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta selama Tahun 2025 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029 “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045”.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

Tujuan Strategis :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusi berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu Indeks Layanan Keagamaan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau dengan indikator tujuan Tingkat Penyelesaian



Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama

Dhammasekha dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi;

4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) Literasi (b) Numerasi, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi.

Sasaran program, sasaran kegiatan

1. Peningkatan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama;
2. Peningkatan kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji;
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji;



6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah;
7. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan;
8. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas;
9. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan;
10. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
11. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;
13. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN;
14. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);
15. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum;
16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;
17. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi;
18. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi.



Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK)

Kode	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
SP1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran
		Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN
		Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
		Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum
		Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
		Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi
		Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi
SP2a	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun	Peningkatan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama
		Peningkatan kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak



SP2b	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji
		Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah
SP3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan
SP4a	Meningkatnya kualitas pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas
SP4b	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan
		Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Pada dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 telah ditetapkan 18 Sasaran Kinerja dan 76 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana dokumen yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekjen Kementerian Agama RI kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan program/kegiatan yang diamanatkan disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penerima amanah dan merupakan kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekjen Kementerian Agama RI selaku pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kinerja yang disepakati dalam perjanjian kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun



sebelumnya, sehingga berkesinambungan, untuk menjamin tercapainya sasaran dan target Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal dan tepat waktu. Dalam penyusunan sasaran strategis selalu mengacu kepada visi misi Kementerian Agama, sasaran strategis telah ditetapkan dan mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025 - 2029. Dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program (SP), dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) ditetapkan 18 (delapan belas) Sasaran Kegiatan (SK) dan 76 (tujuh puluh enam,) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

Perjanjian Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Vol	Satuan
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	83.2	Nilai
		2 Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	19.00	%
		3 Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	25.00	%
		4 Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	7.50	%
		5 Persentase peningkatan peserta event seni budaya	2.00	%
		6 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	25.00	%
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1 Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	85.00	%
		2 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 : 8	Nilai
		3 Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	72.00	%



		4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	12.50	%
		5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	1.50	%
		6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	30.00	%
		7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	76.00	%
		8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	5.50	%
		9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	7.00	%
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	80.00	%
		11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	2.50	%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	90.00	%
		2	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	95.00	%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	95.00	%
		2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	85.00	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	85.00	%
		2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	95.00	%
6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);			
		a.	Lembaga penyelenggara haji khusus;	80.00	%
		b.	Lembaga penyelenggara umrah	80.00	%
7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	siswa/santri satuan Persentase pendidikan umum dengan kekhasan keagamaan agama, satuan pendidikan dan satuan pendidikan pesantren yang baik lulus dengan predikat sangat		55.00	%
8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	1.50	%



		2 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	1.00	%
		3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	1.25	%
		4 Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	95.00	%
		5 Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	75.00	%
		6 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	95.00	%
9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca	70.00	%
		b numerasi	65.00	%
		2 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	85.00	%
		3 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	90.00	%
		4 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	150.00	%
		5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	1.50	%
		6 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	80.00	%
		7 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	80.00	%
		8 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	5.00	%
		9 Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	2.50	%
		10 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1.00	%
		11 Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	75.00	%



		12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	85.00	%
10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	85.00	%
		2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : 30	Nilai
		3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	75.00	%
		4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	80.00	%
		5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	85.00	%
		6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	80.00	%
		7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	78.00	%
		8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	85.00	%
		9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	60.00	%
		10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	75.00	%
		11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	25.00	%
		12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	75.00	%
11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran		Nilai Kinerja Anggaran	95.00	%
12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	95.00	%
		2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	75.00	%
13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95.00	%
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	75.00	%
		3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	95.00	%
		4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	20.00	%



		5 Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	90.00	%
14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Indeks Profesionalisme ASN	72.00	%
		2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	90.00	%
		3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	35.00	%
15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80.00	%
		2 Persentase rekomendasi izin orang asing	85.00	%
16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	80.00	%
		2 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	80.00	%
		3 Nilai Layanan Kesehatan	80.00	%
17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1 Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	80.00	%
		2 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	4.50	%
18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Indeks Pembangunan Statistik	67.00	%
		2 Persentase data statistik yang dipublikasi	75.00	%

Sesuai dengan Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-025.01.2.417595/2025 tanggal 2 Desember 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengelola anggaran sebesar Rp.115.826.684.000,-. Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah RKA 2025, yang terdiri dari 4 program dan 43 kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

- Kegiatan Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
- Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- Kegiatan Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu

Anggaran (ribuan)

Rp. 26.496.047
 Rp. 11.853.455
 Rp. 725.100
 Rp. 6.390.000
 Rp. 1.211.000
 Rp. 64.320
 Rp. 24.000



g. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Rp. 898.000
h. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	Rp. 1.672.238
i. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	Rp. 1.489.000
j. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	Rp. 584.120
k. Kegiatan Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp. 135.580
l. Kegiatan Pembinaan Haji	Rp. 191.694
m. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Rp. 1.257.540
2. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 62.700.882
a. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Rp. 490.000
b. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	Rp. 61.654.562
c. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Rp. 26.520
d. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	Rp. 454.800
e. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	Rp. 75.000
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 55.868.056
a. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	Rp. 11.307.322
b. Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Rp. 40.993.488
c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	Rp. 1.395.000
d. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	Rp. 632.746
e. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	Rp. 908.000
f. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	Rp. 513.000
4. Program Dukungan Manajemen	Rp. 642.711.384
a. Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Rp. 71.500
b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 443.810
c. Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Rp. 129.474.292
d. Kegiatan Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 239.555
e. Kegiatan Pembinaan Administrasi Perencanaan	Rp. 391.135
f. Kegiatan Pembinaan Administrasi Umum	Rp. 14.672.983
g. Kegiatan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	Rp. 170.003
h. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp. 5.403.599
i. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 15.534.279
j. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	Rp. 75.000
k. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	Rp. 317.541
l. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	Rp. 309.400
m. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	Rp. 7.500
n. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 2.789.605
o. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	Rp. 245.000



p. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	Rp. 279.715
q. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	Rp. 270.000
r. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan	Rp. 472.016.467



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban. IKSK dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta adalah indikator hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang akan dicapai pada Tahun 2025 sesuai tugas dan Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan public dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja actual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan (target). Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.



- b. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang.
- c. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan persentase diperoleh dari jumlah capaian dibanding total jumlah satuan masing-masing indikator.
- d. Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%. Untuk menetapkan kategori capaian kinerja telah ditetapkan empat kategori capaian kinerja sebagaimana table berikut :

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 – 120	Biru
2	Baik	80 - 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79,99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Adapun rerata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi dan Capaian		Kategori
		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Realisasi	Capaian	
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama					



	IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	83.20	83.20	100.00%	Baik
	IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	19.00	19.00	100.00%	Baik
	IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	25.00	24.25	97.00%	Baik
	IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	7.50	7.50	100.00%	Baik
	IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	2.00	1.57	78.50%	Cukup
	IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	25.00	24.25	97.00%	Baik
Rerata Capaian IKS K 1					95.42%	Baik
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak					
	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja kategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	85.00	88.94	104.64%	Sangat Baik
	IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 : 8	1 : 8	100.00%	Baik
	IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	72.00	69.00	95.83%	Baik
	IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	12.50	12.50	100.00%	Baik
	IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	1.50	1.48	98.33%	Baik
	IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	3.00	13.80	460.00%	Sangat Baik
	IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	76.00	81.75	107.57%	Sangat Baik
	IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	5.50	5.50	100.00%	Baik
	IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	7.00	7.00	100.00%	Baik
	IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	80.00	80.00	100.00%	Baik
	IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	2.50	3.32	132.60%	Sangat Baik
Rerata Capaian IKS K 2					136.27%	Sangat Baik
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji					
	IKSK.3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	90.00	90.00	100.00%	Baik
	IKSK.3.2	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	95.00	114.00	120.00%	Sangat Baik
Rerata Capaian IKS K 3					110.00%	Sangat Baik
SK.4	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan					



	IKSK.4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	95.00	114.00	120.00%	Sangat Baik
	IKSK.4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	85.00	85.00	100.00%	Baik
Rerata Capaian IKS K 4					110.00%	Sangat Baik
SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji					
	IKSK.5.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	85.00	73.10	86.00%	Baik
	IKSK.5.2	Persentase calon jamaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	95.00	114.00	120.00%	Sangat Baik
Rerata Capaian IKS K 5					103.00%	Sangat Baik
SK.6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah					
	IKSK. 6.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);				
		a. Lembaga penyelenggara haji khusus;	80.00	80.00	100.00%	Baik
		b. Lembaga penyelenggara umrah	80.00	80.00	100.00%	Baik
Rerata Capaian IKS K 6					100.00%	Baik
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan					
	IKSK.7.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	55.00	54.25	98.64%	Baik
Rerata Capaian IKS K 7					98.64%	Baik
SK.8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas					
	IKSK.8.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	1.50	1.33	88.33%	Baik
	IKSK.8.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	1.00	0.97	97.00%	Baik
	IKSK.8.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	1.25	1.25	99.96%	Baik
	IKSK.8.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	95.00	94.25	99.21%	Baik
	IKSK.8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	75.00	73.25	97.67%	Baik



	IKSK.8.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	95.00	94.25	99.21%	Baik
Rerata Capaian IKS K 8					96.90%	Baik
SK.9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan					
	IKSK.9.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:				
		a literasi membaca	70.00	75.71	108.16%	Sangat Baik
		b numerasi	65.00	70.24	108.06%	Sangat Baik
	IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	85.00	81.75	96.18%	Baik
	IKSK.9.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	90.00	82.50	91.67%	Baik
	IKSK.9.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	150.00	150.00	100.00%	Baik
	IKSK.9.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	1.50	1.45	96.33%	Baik
	IKSK.9.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	80.00	80.00	100.00%	Baik
	IKSK.9.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	80.00	70.00	87.50%	Baik
	IKSK.9.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	5.00	4.55	91.00%	Baik
	IKSK.9.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	2.50	2.38	95.00%	Baik
	IKSK.9.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1.00	0.79	79.00%	Cukup
	IKSK.9.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	75.00	72.25	96.33%	Baik
	IKSK.9.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	85.00	81.75	96.18%	Baik
Rerata Capaian IKS K 9					95.80%	Baik
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan					
	IKSK.10.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	85.00	87.38	102.80%	Sangat Baik
	IKSK.10.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : 30	1 : 30	100.00%	Baik



	IKSK.10.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	75.00	74.25	99.00%	Baik
	IKSK.10.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	80.00	82.24	102.80%	Sangat Baik
	IKSK.10.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	85.00	78.63	92.51%	Baik
	IKSK.10.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	80.00	65.00	81.25%	Baik
	IKSK.10.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	78.00	77.66	99.56%	Baik
	IKSK.10.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	85.00	85.00	100.00%	Baik
	IKSK.10.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	60.00	47.49	79.15%	Cukup
	IKSK.10.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	75.00	57.53	76.71%	Cukup
	IKSK.10.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	25.00	34.35	137.40%	Sangat Baik
	IKSK.10.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	75.00	72.25	96.33%	Baik
Rerata Capaian IKS K 10					97.29%	Baik
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran					
	IKSK.11.1	Nilai Kinerja Anggaran	95.00	91.53	96.35%	Baik
Rerata Capaian IKS K 11					96.35%	Baik
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi					
	IKSK.12.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	95.00	93.10	98.00%	Baik
	IKSK.12.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	75.00	60.00	80.00%	Baik
Rerata Capaian IKS K 12					89.00%	Baik
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN					
	IKSK.13.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95.00	95.00	100.00%	Baik
	IKSK.13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	75.00	72.75	97.00%	Baik
	IKSK.13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	95.00	95.00	100.00%	Baik
	IKSK.13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	20.00	20.00	100.00%	Baik
	IKSK.13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	90.00	90.00	100.00%	Baik
Rerata Capaian IKS K 13					99.40%	Baik
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)					
	IKSK.14.1	Indeks Profesionalisme ASN	72.00	72.00	100.00%	Baik



	IKSK.14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	90.00	90.00	100.00%	Baik
	IKSK.14.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	35.00	38.00	108.57%	Sangat Baik
Rerata Capaian IKS 14					102.86%	Sangat Baik
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum					
	IKSK.15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80.00	80.00	100.00%	Baik
	IKSK.15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	85.00	85.94	101.11%	Sangat Baik
Rerata Capaian IKS 15					100.55%	Sangat Baik
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persurutan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa					
	IKSK. 16.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	80.00	78.32	97.90%	Baik
	IKSK. 16.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	80.00	88.00	110.00%	Sangat Baik
	IKSK. 16.3	Nilai Layanan Kesehatan	80.00	67.00	83.75%	Baik
Rerata Capaian IKS 16					97.22%	Baik
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi					
	IKSK.17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	80.00	75.00	93.75%	Baik
	IKSK.17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	4.50	4.48	99.44%	Baik
Rerata Capaian IKS 17					96.60%	Baik
SK.18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi					
	IKSK.18.1	Indeks Pembangunan Statistik	67.00	65.25	97.39%	Baik
	IKSK.18.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	75.00	73.25	97.67%	Baik
Rerata Capaian IKS 18					97.53%	Baik
Nilai Capaian Kinerja Kanwil Tahun 2025					103.52%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebesar 103.52 (Sangat Baik) dengan 18 Sasaran Kegiatan dan 76 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, dengan penjelasan capaian masing-masing sasaran indikator sebagai berikut :



Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama

Sasaran kegiatan ini ada 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00, (2) Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS, (3) Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS, (4) Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWADHARMAGITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA , (5) Persentase peningkatan peserta event seni budaya, (6) Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00, dan (2) Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS, mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, (3) Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS, mencapai 97% kurang dari target yang telah direncanakan atau baik (4) Persentase peningkatan audiens MTQ / PESPARAWI / PESPERANI / UTSAWADHARMAGITA / SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA, mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (5) Persentase peningkatan peserta event seni budaya mencapai 78,50% kurang dari target yang telah ditentukan atau cukup, (6) Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan mencapai 97% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik sehingga memperoleh



rerata capaian 95,42% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama, menunjukkan bahwa peningkatan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan telah berjalan sangat baik dan berdampak positif terhadap kehidupan sosial keagamaan. Ke depan, penguatan edukasi moderasi beragama, literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor perlu terus ditingkatkan agar capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	83.20	83.20	100	• Kebijakan dan program pembinaan kerukunan umat beragama berjalan optimal. • Dialog lintas agama dan kegiatan moderasi beragama terlaksana secara konsisten. • Respons terhadap potensi konflik sosial keagamaan dilakukan secara cepat dan terukur. • Nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan semakin terinternalisasi di masyarakat.	• Dinamika sosial dan perbedaan pemahaman keagamaan di masyarakat. • Penyebaran informasi yang berpotensi memicu intoleransi di ruang digital. • Kesenjangan implementasi program di wilayah tertentu.
2 Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	19.00	19.00	100		
3 Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	25.00	24.25	97		
4 Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMAGITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	7.50	7.50	100		
5 Persentase peningkatan peserta event seni budaya	2.00	1.57	78.50		
6 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	25.00	24.25	97		



SK.1.a. Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kemenag DIY kunjungi KUA Dlingo, Bantul, Rabu (12/3/2025) dalam rangka monev Layanan Kepenghuluan. Rombongan dipimpin Kabid Urais Sa'ban Nuroni



SK.1.b. Kakanwil @ahmadbahiej1975 didampingi Kabid Penais Zawa Nurhuda membuka dan memberi arahan pada ajang Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Moderasi Beragama, Selasa (29/4/2025) di Yogyakarta. Kegiatan digelar dua hari hingga Rabu (30/4/2025)

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Sasaran kegiatan ini ada 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan), (2) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan



bimbingan agama, (3) Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi, (4) Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah, (5) Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan, (6) Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan, (7) Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat, (8) Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan, (9) Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah, (10) Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan, (11) Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional. Perbandingan target dan realisasi pada IKS

(1) Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) mencapai 104,64% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik, (2) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama, mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik (3) Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi, mencapai 95,83% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (4) Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah, mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, (5) Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan mencapai 98,33% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (6) Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan mencapai 460% melebihi dari target yang telah direncanakan atau sangat



baik, (7) Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat mencapai 107,57% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik, (8) Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan, (9) Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah, (10) Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, (11) Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional mencapai 132,60% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik, sehingga memperoleh rerata capaian 136,27% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, menunjukkan keberhasilan yang sangat luar biasa dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak. Target tidak hanya tercapai, tetapi terlampaui secara signifikan, mencerminkan efektivitas program dan komitmen kuat terhadap pelayanan publik berbasis nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	85.00	88.94	104.64	- Realisasi program layanan keagamaan melebihi target kuantitatif yang ditetapkan. - Jangkauan layanan semakin luas dan menjangkau kelompok rentan atau wilayah tertentu. - Standar profesionalisme petugas layanan semakin meningkat.	-
2 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 : 8	1 : 8	100		
3 Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	72.00	69.00	95.83		
4 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	12.50	12.50	100		
5 Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	1.50	1.48	98.33		



6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	3.00	13.80	460	Dampak layanan terhadap masyarakat (kepuasan, kemudahan akses, manfaat sosial) menunjukkan hasil positif.
7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	76.00	81.75	107.57	
8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	5.50	5.50	100	
9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	7.00	7.00	100	
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	80.00	80.00	100	
11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	2.50	3.32	132.60	



SK.2.a. Pada ajang PAI Award, DIY meraih 1 Pemenang Terbaik kategori Kesehatan Masyarakat melalui karya Khotimatul Husna



SK.2.b. Kunter Komisi VIII DPR RI, Sabtu (25/7/2025) di Balai Besar Pendidikan & Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Hadir turut menyambut Kakanwil [@ahmadbahie1975](#), Dirzawa Waryono Abdul Ghafur, Dirbina Haji Musta'in Ahmad, Deputi Bid Reg & Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet B

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji

Sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota, (2) Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, sedangkan perbandingan target dan realisasi pada IKSK (2) Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar mencapai 120% melebihi rencana yang telah direncanakan atau sangat baik, sehingga memperoleh rerata capaian 110% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji. Target tidak hanya tercapai, tetapi terlampaui, mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan serta komitmen kuat dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional kepada jemaah.



Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	90	90	100	• Standar pelayanan jemaah (akomodasi, konsumsi, transportasi, dan bimbingan ibadah) terlaksana lebih baik dari target. • Respons terhadap kebutuhan dan pengaduan jemaah semakin cepat dan efektif. • Koordinasi petugas haji di dalam dan luar negeri berjalan optimal. • Tingkat kepuasan jemaah mengalami peningkatan signifikan.	-
2 Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	95	114	120		



SK.3.a. Kakanwil @ahmadbahie1975 yang juga Wakil Ketua I Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Solo lepas Kloter 61 SOC (Sragen-Karanganyar), Selasa (20/5/2025) di Asrama Haji Donohudan. Salah seorang jamaah adalah Kakanwil Kemenag DIY 2021-2024 Dr. Masmin Afif

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan, (2) Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan mencapai 120% melebihi dari target yang telah direncanakan atau sangat baik dan IKSK (2) Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan



Umrah Terpadu mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 110% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji mencerminkan kinerja sangat baik dan menunjukkan bahwa pelayanan pendaftaran ibadah haji telah berjalan secara profesional, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	95	114	120	• Optimalisasi sistem digital seperti pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi haji yang terintegrasi (misalnya sistem pendaftaran melalui Kementerian Agama Republik Indonesia). • Percepatan proses verifikasi dan validasi data calon jemaah haji sehingga waktu layanan menjadi lebih singkat. • Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan. • Transparansi informasi terkait kuota, estimasi keberangkatan, dan prosedur pendaftaran.	-
2 Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	85	85	100		

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji

Sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75, (2) Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 mencapai 86% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik sedangkan IKSK (2) Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji mencapai 120%



melebihi rencana yang telah direncanakan atau sangat baik, sehingga memperoleh rerata capaian 103% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji mencerminkan keberhasilan yang baik dalam meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji. Program telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kesiapan jamaah. Ke depan, inovasi berkelanjutan dan peningkatan standar mutu pembinaan menjadi kunci untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	85	73,10	86	- Perencanaan program pembinaan berjalan efektif. - Target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai dengan optimal. - Sistem monitoring dan evaluasi pembinaan sudah berjalan baik.	-
2 Persentase calon jamaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	95	114	120		



SK.5. Kakanwil @ahmadbahiej1975 imbau para calon jamaah haji agar tidak memikirkan diri sendiri, tapi harus pikirkan jamaah lainnya. Yang muda perhatikan yang tua. Dengan saling membantu kita bisa raih haji mabrur



Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah

Sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Lembaga penyelenggara haji khusus, (2) Lembaga penyelenggara umrah. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Lembaga penyelenggara haji khusus dan IKSK (2) Lembaga penyelenggara umrah mencapai 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 100% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah menandakan bahwa peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara Haji Khusus dan Umrah telah berjalan efektif dan sesuai target. Konsistensi pelaksanaan, penguatan regulasi, serta inovasi sistem pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan dan perlindungan jamaah secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Lembaga penyelenggara haji khusus	80	80	100	• Pelaksanaan pembinaan rutin kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). • Penguatan regulasi dan kepatuhan terhadap standar operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. • Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja penyelenggara. • Penanganan pengaduan masyarakat secara responsif dan transparan.	-
2 Lembaga penyelenggara umrah	80	80	100		



SK.6. Kakanwil @ahmadbahiej1975 hadir memberikan sambutan sekaligus membuka Manasik Perdana Haji Khusus 2026 & Sosialisasi Regulasi Baru Haji Khusus yang digelar PT Nur Ramadhan, Ahad (7/7/2025) di The Alana Yogyakarta Hotel. Persiapan lebih dini untuk menggapai kemabruran

Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan

Sasaran kegiatan ini ada 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik mencapai 98,64% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 98,64% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses dan penyelesaian pendidikan pada satuan pendidikan keagamaan. Program telah berjalan efektif sesuai target, dan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan mutu dan pemerataan agar dampaknya semakin berkelanjutan dan berkualitas.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan	55	54,25	98,64	• Perluasan akses pendidikan melalui optimalisasi satuan pendidikan keagamaan (madrasah, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya).	-



agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik			• Pemberian bantuan operasional dan program afirmasi bagi siswa kurang mampu. • Penguatan regulasi dan pembinaan satuan pendidikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. • Monitoring terhadap angka partisipasi dan angka kelulusan siswa.	
---	--	--	--	--



SK.7. Kabid Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kemenag DIY Aidi Johansyah hadir peresmian Pesantren Bidayatussalikin untuk santri Narkoba, Kamis (10/4/2025). Berlokasi di Tritis Tlogo Purwobinangan Pakem Sleman, ini juga gelar pendidikan PKPPS jenjang Ulya, Wustha dan Ula

Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas

Sasaran kegiatan ini ada 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, (2) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana, (3) Persentase peningkatan jumlah siswa



pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren, (4) Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha), (5) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah, (6) Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren. Perbandingan target dan realisasi pada IKS (1) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, mencapai 88,33% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (2) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana, mencapai 97% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (3) Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren, mencapai 99,96% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (4) Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha), mencapai 99,21% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (5) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah, mencapai 97,67% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik (6) Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren mencapai 99.21% kurang dari



target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 96,90% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas menandakan keberhasilan dalam meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan sesuai target. Ke depan, fokus tidak hanya pada pemenuhan standar minimal, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan fasilitas pendidikan agar semakin mendukung mutu pembelajaran yang optimal.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	1.50	1.33	88.33	• Realisasi pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. • Penyaluran bantuan sarana pendidikan secara tepat sasaran. • Peningkatan standar kelayakan dan keamanan fasilitas pendidikan. • Pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap satuan pendidikan keagamaan.	-
2 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	1.00	0.97	97		
3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	1.25	1.25	99.96		
4 Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	95.00	94.25	99.21		
5 Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	75.00	73.25	97.67		
6 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	95.00	94.25	99.21		



SK.8. Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY gelar Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kemenag, Kamis (13/3/2025) di MAN 2 Sleman. Acara dibuka Katim Abd. Naim dengan narasumber dari Ditjen Pendis Kemenag RI Anis Maskur. Diikuti Madrasah Inklusi se-DIY

Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan

Sasaran kegiatan ini ada 12 (dua belas) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk : a.literasi b.numerasi, (2) Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas, (3) Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, (4) Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler, (5) Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab), (6) Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan



dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan, (7) Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B, (8) Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara, (9) Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual, (10) Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional, (11) Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik, (12) Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk : a.literasi mencapai 108,16% mencapai melebihi dari target yang telah direncanakan atau sangat baik b.numerasi mencapai 108,06% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik, Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (2) Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas, mencapai 96,18% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik (3) Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, mencapai 91,67% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (4) Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler, mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, (5) Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab), mencapai 96,33% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (6) Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung



peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan, mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, (7) Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B, mencapai 87,50% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (8) Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara, mencapai 91% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (9) Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual mencapai 95% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (10) Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional mencapai 79% kurang dari target yang telah ditentukan atau cukup, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (11) Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik, mencapai 96,33% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik (12) Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran mencapai 96,18% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 95,80% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, menunjukkan bahwa peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kompetensi telah berjalan sangat baik dan hampir sepenuhnya mencapai target. Dengan perbaikan minor pada aspek implementasi dan pemerataan, capaian ini berpotensi



meningkat dan semakin memperkuat mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk : a. Literasi membaca b. Numerasi	70 65	75,71 70,24	108,16 108,06	- Sistem penilaian pendidikan telah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis standar kompetensi. - Proses asesmen mendukung pengukuran capaian pembelajaran secara komprehensif (kognitif, afektif, dan psikomotorik). - Perangkat kurikulum telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk pendekatan diferensiasi dan inklusivitas. - Implementasi pembelajaran berorientasi pada kompetensi berjalan efektif di satuan pendidikan.	- Variasi implementasi kurikulum antar satuan pendidikan. - Penyesuaian teknis sistem penilaian di beberapa wilayah. - Proses penyempurnaan perangkat pembelajaran yang masih berlangsung.
2 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	85.00	81.75	96.18		
3 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	90.00	82.50	91.67		
4 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	150.00	150.00	100		
5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	1.50	1.45	96.33%		
6 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	80.00	80.00	100		
7 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	80.00	70.00	87.50		
8 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	5.00	4.55	91		
9 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	2.50	2.38	95		
10 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1.00	0.79	79		



11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	75.00	72.25	96.33		
12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	85.00	81.75	96.18		



SK.9. Bimas Kristen mengapresiasi hasil akreditasi Sekolah Dasar Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Jogja Patriae Academy Yogyakarta dengan Nilai A (Unggul) dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, Kamis (2/1/2025)

Sasaran Kegiatan 10 : Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

Sasaran kegiatan ini ada 12 (dua belas) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik, (2) Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP, (3) Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, (4) Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik, (5) Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil, (6) Persentase Kepala



satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil, (7) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik, (8) Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil, (9) Persentase guru yang meningkat jenjang karir, (10) Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir, (11) Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), (12) Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik mencapai 102,80% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik, perbandingan target dan realisasi (2) Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP, mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik dan (3) Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal mencapai 99% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (4) Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik mencapai 102,80% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (5) Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil, mencapai 92,51% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (6) Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen



Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil mencapai 81,25% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, (7) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik mencapai 99,56 kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (8) Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil mencapai 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan atau baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (9) Persentase guru yang meningkat jenjang karir dan (10) Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir mencapai kurang dari 100% belum memenuhi target tapi bernilai baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (11) Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) mencapai 137,40% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik, (12) Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan mencapai 96,33% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 97,29% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dalam meningkatkan pemerataan guru dan tenaga kependidikan. Upaya redistribusi telah berjalan efektif, meskipun masih diperlukan penguatan strategi pemerataan di wilayah tertentu agar ke depan target dapat tercapai secara penuh dan berkelanjutan.



Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	85	87,38	102,80	• Pelaksanaan redistribusi guru dan tenaga kependidikan ke wilayah yang kekurangan. • Optimalisasi sistem pendataan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. • Rekrutmen dan penempatan ASN secara lebih terencana. • Koordinasi pembinaan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan.	• Penguatan sistem pemetaan berbasis data terintegrasi. • Kebijakan afirmatif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah khusus. • Peningkatan fleksibilitas kebijakan mutasi dan penempatan. • Pengembangan skema insentif untuk wilayah terpencil.
2 Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : 30	1 : 30	100		
3 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	75.00	74.25	99		
4 Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	80.00	82.24	102.80		
5 Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	85.00	78.63	92.51		
6 Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	80.00	65.00	81.25		
7 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	78.00	77.66	99.56		
8 Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	85.00	85.00	100		
9 Persentase guru yang meningkat jenjang karir	60.00	47.49	79.15		
10 Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	75.00	57.53	76.71		
11 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	25.00	34.35	137.40		
12 Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	75.00	72.25	96.33		



SK.10. Kakanwil @ahmadbahie1975 didampingi Kabid Pakis Aidi Johansyah hadir memberikan bekal kepada Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG), Rabu (18/6/2025). Kegiatan ini diikuti 405 peserta di Asrama Haji Yogyakarta. Semoga nantinya semua lolos mendapatkan Sertifikat Pendidik

Sasaran Kegiatan 11 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Sasaran kegiatan ini ada 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Nilai Kinerja Anggaran, mencapai 96,35% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 96,35% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai sesuai target, mencerminkan kualitas perencanaan dan anggaran yang sudah sangat baik dan berjalan efektif. Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas perencanaan, serta optimalisasi sistem berbasis data, capaian ini berpotensi meningkat hingga mencapai target maksimal pada periode mendatang.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Nilai Kinerja Anggaran	95	93,10	96,35	• Penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan rencana strategis dan prioritas nasional. • Peningkatan kualitas penyusunan RKA dan dokumen pendukung secara lebih terukur dan berbasis kinerja.	• Penguatan kapasitas SDM perencana melalui pelatihan teknis. • Optimalisasi sistem perencanaan berbasis aplikasi terintegrasi. • Peningkatan kualitas analisis kebutuhan dan proyeksi anggaran.



			• Sinkronisasi program dan kegiatan antarunit kerja. • Pembinaan dan pengawasan perencanaan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.	• Monitoring dan evaluasi berkala terhadap konsistensi perencanaan dan realisasi.
--	--	--	---	---



SK.11. Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Setjen @Kemenag RI Muhamad Iqbal menyampaikan Kebijakan Program dan Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Kerja Wilayah Kemenag DIY hari pertama, Selasa (21/1/2025). Sesi ini dipandu Kabag Tata Usaha Muntolib

Sasaran Kegiatan 12 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar, (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar mencapai 98% menunjukkan bahwa hampir seluruh satuan kerja telah menyusun laporan kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan kategori baik perbandingan target dan realisasi pada IKSK (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75 mencapai 80%, sehingga memperoleh rerata capaian 89% yang artinya bahwa pada sasaran



kegiatan Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa kualitas penerapan reformasi birokrasi sudah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek strategis. Dengan komitmen yang konsisten, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi digitalisasi, capaian reformasi birokrasi berpotensi meningkat dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	95	93,10	98	• Penguatan tata kelola organisasi dan penyederhanaan proses bisnis. • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja. • Implementasi sistem pengawasan internal. • Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.	• Penguatan komitmen pimpinan terhadap implementasi reformasi birokrasi. • Internalisasi nilai-nilai integritas dan budaya kerja profesional. • Digitalisasi proses layanan dan administrasi. • Monitoring dan evaluasi berbasis indikator area perubahan secara berkala. • Peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen perubahan.
2 Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	75	60	80		



SK.12. Kakanwil @ahmadbahiej1975 didampingi segenap tim Pembangunan ZI Kemenag DIY ikuti Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi 2025-2029 "Menciptakan Praktik Beragama Berdampak untuk Mewujudkan Birokrasi yg Kolaboratif, Kapabel & Berintegritas", Senin (26/5/2025) secara daring di RR PTSP

Sasaran Kegiatan 13 : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN

Sasaran kegiatan ini ada 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, (2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, (3) Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, (4) Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), (5) Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, mencapai 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan atau baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 97% menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang sangat tinggi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan , perbandingan target dan realisasi pada IKSK (3) Persentase Laporan



Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, (4) Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), (5) Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu mencapai 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 99,40% artinya bahwa sasaran kinerja meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan BMN secara efektif dan sesuai target. Ke depan, konsistensi pelaksanaan, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem pengawasan menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan kinerja.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	95	100	- Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. - Pengelolaan BMN yang tertib administrasi, mulai dari pencatatan, pemanfaatan, hingga pengamanan aset. - Penguatan sistem pengendalian internal. - Pembinaan dan monitoring oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap satuan kerja.	-
2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	75	72,75	97		
3 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	95	95	100		
4 Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	20	20	100		
5 Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	90	90	100		



SK.13. Pembimas Buddha Naryoto didampingi Katim Keuangan dan BMN Saniyyatuz Zulfa & Arsiparis Merpati Giras sambut Pendampingan Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Barang Milik Negara, Penyusunan Laporan Keuangan & Pengelolaan Arsip Dinamis 2025 oleh Ditjen Bimas Buddha, Rabu (16/7/2025)

Sasaran Kegiatan 14 : Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Sasaran kegiatan ini ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Indeks Profesionalisme ASN, (2) Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan, (3) Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Indeks Profesionalisme ASN dan (2) Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, sedangkan perbandingan target dan realisasi pada IKSK (3) Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif mencapai 108,57% melebihi target yang telah di



rencanakan atau sangat baik, sehingga memperoleh rerata capaian 102,86% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pengelolaan ASN, baik dari sisi pengadaan, penempatan, pembinaan, maupun pengembangan pegawai. Hal ini mencerminkan tata kelola SDM yang semakin profesional, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Ke depan, konsistensi implementasi sistem merit dan inovasi manajemen SDM menjadi kunci untuk mempertahankan kinerja yang unggul dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Indeks Profesionalisme ASN	72	72	100	- Realisasi pengadaan ASN melebihi target formasi atau percepatan proses seleksi berjalan optimal. - Penempatan pegawai semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan organisasi. - Program pembinaan dan pengembangan kompetensi terlaksana lebih luas dari yang direncanakan. - Indikator pengembangan SDM (diklat, sertifikasi, peningkatan kompetensi) melampaui target kuantitatif. Rekonsiliasi data keuangan dan aset dilakukan secara berkala dan akurat.	-
2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	90	90	100		
3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	35	38	108,57		



SK.14. Pembinaan awal bulan Kanwil Kemenag DIY, Senin (3/3/2025) di Aula Lantai III. Dipimpin Kabag Tata Usaha Muntolib didampingi jajaran Kepala Bidang & Pembimas. Diikuti seluruh jajaran ASN Kemenag DIY. Efisiensi anggaran berlaku tahun ini, dg tetap pertahankan kinerja layani umat

Sasaran Kegiatan 15 : Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum

Sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase kasus hukum yang terselesaikan, (2) Persentase rekomendasi izin orang asing. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Persentase kasus hukum yang terselesaikan mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan atau baik, sedangkan pada IKSK (2) Persentase rekomendasi izin orang asing mencapai 101,11% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik. Sehingga memperoleh rerata capaian 100,55% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum telah berhasil secara sangat optimal dan bahkan melampaui target. Hal ini mencerminkan komitmen kuat terhadap profesionalisme, kepatuhan regulasi, dan perlindungan hukum bagi organisasi.



Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80	80	100	• Penyelesaian kasus atau pendampingan hukum tepat waktu. • Peningkatan kualitas konsultasi dan advokasi hukum. • Penyusunan produk hukum yang lebih tertib dan sesuai regulasi. • Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan hukum oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.	-
2 Persentase rekomendasi izin orang asing	85	85,94	101,11		

Sasaran Kegiatan 16 : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

Sasaran kegiatan ini ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses, (2) Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap, (3) Nilai Layanan Kesehatan. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses mencapai 97,90% belum mencapai target yang telah ditentukan atau baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (2) Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap mencapai 110% melebihi target yang telah direncanakan atau sangat baik, perbandingan target dan realisasi pada IKSK (3) Nilai layanan kesehatan mencapai 83,75% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 97,22% yang artinya bahwa pada sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan dalam peningkatan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang/jasa. Kinerja ini menunjukkan tata kelola



administrasi yang semakin profesional, efisien, dan akuntabel. Ke depan, konsistensi mutu dan penguatan sistem berbasis teknologi menjadi kunci untuk menjaga capaian yang unggul dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	80	78,32	97,90	- Sistem tata persuratan telah terdigitalisasi dan mempercepat disposisi serta distribusi surat. - Pengelolaan arsip semakin tertib, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri kembali. - Proses pengadaan barang/jasa berjalan efektif, transparan, dan tepat waktu. - Indikator layanan (kecepatan, ketepatan, kepatuhan prosedur) melampaui target kuantitatif.	-
2 Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	80	88	110		
3 Nilai Layanan Kesehatan	80	67	83,75		



SK.16. Tim Umum dan Protokol gelar Rakor Penyusunan Roadmap Sarana Prasarana 2025, Kamis (13/2/2025) di Ruang Rapat 1. Kabag TU Muntolib didampingi Katim Bahrul Anwar menegaskan roadmap penting untuk jalannya kebutuhan instansi. Hadir Pengelola BMN dan Sarpras Kanwil, dan Kabupaten/Kota



Sasaran Kegiatan 17 : Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi

Sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID, (2) Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID mencapai 93,75% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, dan 2) Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi mencapai 99,44% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 96,60% yang artinya bahwa pada sasaran kinerja Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi, menunjukkan keberhasilan optimal dalam meningkatkan layanan informasi dan dokumentasi. Layanan telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan, mendukung transparansi, serta memperkuat akuntabilitas publik. Ke depan, inovasi dan konsistensi mutu menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	80	75	93,75	- Seluruh permohonan informasi publik ditindaklanjuti tepat waktu. - Pengelolaan dokumentasi dilakukan secara tertib dan terstruktur. - Daftar Informasi Publik (DIP) diperbarui secara berkala. - Tidak terdapat atau sangat minim sengketa informasi. - Layanan informasi berbasis digital berjalan efektif dan mudah diakses.	-
2 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	4,5	4,48	99,44		



SK.17. Jajaran Prahum dan Prakom HDI KUB dipimpin Katim Imam Khoiri ikuti Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pada PPID Unit Kanwil, Selasa (16/9/2025) secara daring. Verifikator dari Biro HKP menilai Kemenag DIY sangat lengkap menyajikan kebutuhan PPID sekaligus KIP

Sasaran Kegiatan 18 : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : (1) Indeks Pembangunan Statistik, (2) Persentase data statistik yang dipublikasi. Perbandingan target dan realisasi pada IKSK (1) Indeks Pembangunan Statistik mencapai 97,39% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik dan 2) Persentase data statistik yang dipublikasi mencapai 97,67% kurang dari target yang telah ditentukan atau baik, sehingga memperoleh rerata capaian 97,53% yang artinya bahwa pada sasaran kinerja Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, menunjukkan keberhasilan optimal dalam meningkatkan kualitas data dan sistem informasi. Tata kelola data telah berjalan efektif, mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat.



Ke depan, konsistensi pemutakhiran data dan inovasi teknologi menjadi kunci untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem informasi.

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
1 Indeks Pembangunan Statistik	67	65,25	97,39	• Data yang dikelola telah memenuhi prinsip validitas, akurasi, dan keterkinian (up to date). • Sistem informasi berjalan stabil dan mendukung kebutuhan operasional organisasi. • Integrasi antar aplikasi dan unit kerja terlaksana dengan baik. • Pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi semakin optimal.	-
2 Persentase data statistik yang dipublikasi	75	73,25	97,67		

B. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran menyajikan ikhtiar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam satu periode pelaporan sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Realisasi anggaran juga merepresentasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada masing-masing indikator kinerja utama yang telah ditetapkan melalui pendekatan nilai realisasi belanja.

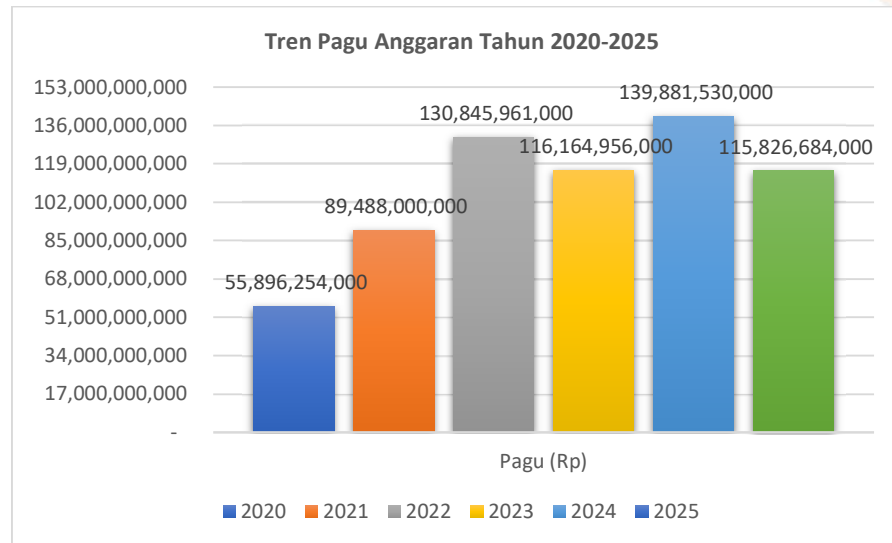
Capaian kinerja anggaran merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja anggaran dalam hal pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja instansi,



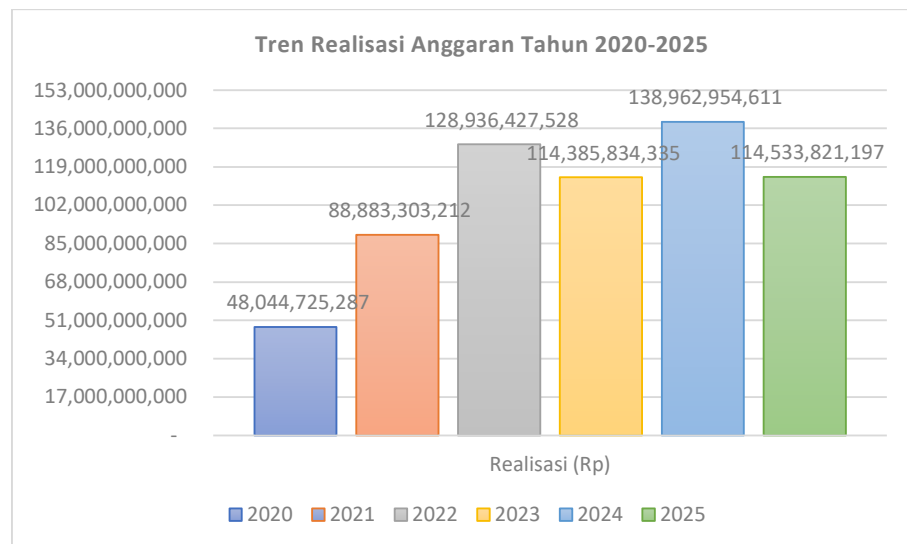
membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik.

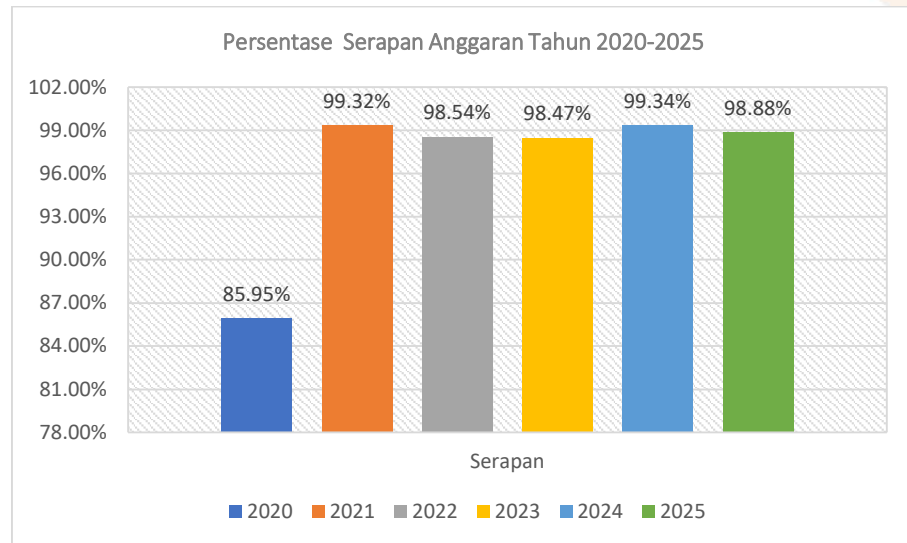
1. Pagu Anggaran Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2025

Berdasarkan tren pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2025, anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya dari tahun 2020-2022 dan sempat mengalami penurunan anggaran di tahun 2023. Kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp.23.716.574.000,- dari nominal Rp.116.164.956.000,- menjadi Rp.139.881.530.000,- di tahun 2024. Anggaran 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.24.054.846.000,- dikarenakan Pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan kebutuhan program, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pengelolaan keuangan negara yang berlangsung sejak akhir tahun 2024 hingga tahun berjalan 2025.



2. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2025





Pertama, pada akhir Tahun Anggaran 2024, setelah pengesahan DIPA Tahun 2025, diterapkan mekanisme blokir anggaran perjalanan dinas sebesar 50%. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pengendalian belanja pemerintah untuk menjaga kualitas belanja dan memastikan prioritas penggunaan anggaran lebih terarah pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dampak dari kebijakan tersebut adalah tidak seluruh pagu yang tercantum dalam DIPA dapat langsung direalisasikan karena sebagian masih dalam status terblokir. Kedua, memasuki Triwulan I Tahun Anggaran 2025, pemerintah kembali menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui mekanisme pemblokiran mandiri (self-blocking) oleh satuan kerja. Kebijakan ini mendorong setiap unit kerja untuk melakukan penajaman prioritas dan rasionalisasi belanja, khususnya pada komponen-komponen yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa mengganggu capaian output utama. Langkah ini diambil dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal serta meningkatkan efektivitas belanja



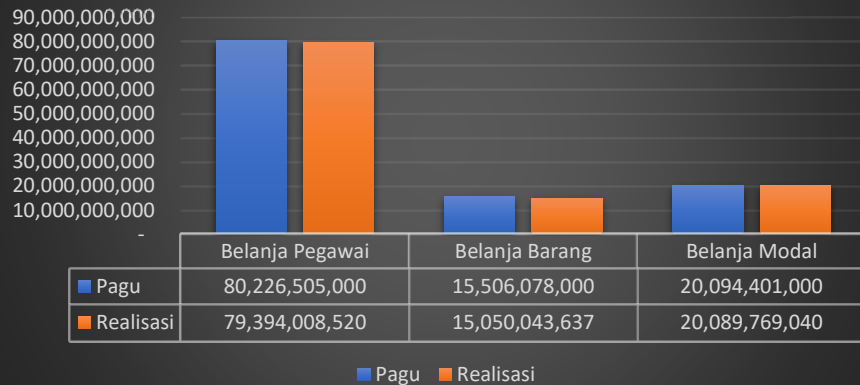
pemerintah. Selanjutnya, pada Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025, sebagian dari anggaran yang sebelumnya berstatus terblokir tidak seluruhnya dibuka kembali, melainkan dilakukan penyesuaian melalui mekanisme pengurangan pagu anggaran. Dengan demikian, blokir yang pada awalnya bersifat administratif dan sementara, pada akhirnya dikonversi menjadi pengurangan pagu definitif. Kondisi ini secara langsung menyebabkan total pagu anggaran Tahun 2025 menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pagu Tahun 2024. Secara umum, penurunan anggaran Tahun 2025 mencerminkan adanya kebijakan pengendalian dan efisiensi belanja negara yang bersifat struktural dan terukur.

3. Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 total pagu anggaran sebesar Rp.115.826.684.000,- dengan realisasi sebesar Rp.114.533.821.197,- atau terserap 98,88%. Kalo dibandingkan dengan pagu awal anggaran pada triwulan I tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp.12.636.675.000,- dikarenakan bahwa diakhir triwulan 3 atau awal triwulan 4 terjadi penyesuaian anggaran, sehingga anggaran terblokir tidak semua dibuka blokirnya, namun sebagian penyesuaiannya dilakukan dengan mekanisme pengurangan pagu anggaran.



Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025



Dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal, antara lain :

1. Setelah pengesahan DIPA Tahun 2025, diterapkan mekanisme blokir anggaran perjalanan dinas sebesar 50%.
2. Memasuki Triwulan I Tahun Anggaran 2025, pemerintah kembali menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui mekanisme pemblokiran mandiri (self-blocking) oleh satuan kerja.
3. Selanjutnya, pada triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025, sebagian dari anggaran yang sebelumnya berstatus terblokir tidak seluruhnya dibuka kembali, melainkan dilakukan penyesuaian melalui mekanisme pengurangan pagu anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2024 Nilai Kinerja Anggaran (NKA bersumber dari Smart DJA) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 87,65 dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini termasuk dalam kategori Baik, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan anggaran



telah dilaksanakan secara efektif serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik.

Realisasi anggaran secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan target output yang ditetapkan. Sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Tingkat konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan juga menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi nilai kinerja anggaran, antara lain dinamika pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal, proses revisi anggaran, serta belum meratanya penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya capaian hingga kategori sangat baik.

Sebagai tindak lanjut, upaya perbaikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih akurat dan terukur, penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran, serta optimalisasi pengendalian internal. Dengan langkah tersebut diharapkan pada tahun berikutnya Nilai Kinerja Anggaran dapat meningkat dan mencapai kategori Sangat Baik.

Pada Tahun Anggaran 2025 Nilai Kinerja Anggaran (NKA bersumber dari Smart DJA) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yakni



sebesar 91,52 dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tingginya nilai NKA mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dengan target output yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran berjalan optimal dan proporsional pada setiap periode, serta didukung oleh ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Kualitas pengendalian internal dan monitoring evaluasi juga berkontribusi signifikan dalam meminimalkan deviasi serta memastikan ketercapaian sasaran strategis.

Selain itu, koordinasi antar unit kerja dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan semakin baik, sehingga mampu mengurangi kebutuhan revisi anggaran dan meningkatkan efektivitas penyerapan dana. Penguatan komitmen terhadap disiplin anggaran dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan turut menjadi faktor pendukung capaian ini.

Ke depan, upaya peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran, serta optimalisasi sistem pelaporan dan evaluasi akan terus dilakukan guna mempertahankan bahkan meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berikutnya.



C. Capaian Kinerja Lainnya

Inovasi :

Inovasi **TREN KETAN JAWA** (Pesantren Kelompok Rentan Jogja Istimewa)

Program TREN KETAN JAWA digagas dalam rangka melakukan upaya pembinaan dan bimbingan kepada seluruh pesantren yang ada di DIY dan membentuk ekosistem terkait dengan kemudahan akses pendidikan kepada masyarakat baik secara formal maupun informal. Tahun 2021, Kanwil kemenag DIY memulai mengarahkan dan menata kembali fungsi pendidikan agama dipesantren untuk kelompok umum dan rentan, yang memungkinkan Kanwil untuk dapat menyusun kebijakan terkait pembinaan dan supervisi yang terukur kepada pesantren inklusi ini. Tahapan implementasi inovasi TREN KETAN JAWA dimulai dari Pemetaan fungsi Pesantren berdasarkan santri. Kemudian disemester 2, dilakukan penataan pesantren regular dan inklusi. Selanjutnya, pemilihan Pilot Project Tren Ketan Jawa. Lokus inovasi ini adalah pesantren yang telah berhasil mengelola kelompok rentan dalam pendidikannya seperti balita, lansia, disabilitas, dan ODGJ, salah satunya adalah Pesantren Madania yang merupakan pesantren Kelompok Rentan di Yogyakarta. Pesantren tersebut mengembangkan kurikulum inklusif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan santri kelompok rentan. Monitoring dan evaluasi pilot project Tren Ketan Jawa dilakukan setiap akhir tahun. Melakukan Kerjasama dengan komite Disabilitas merupakan salah satu milestone penting dalam inovasi ini, tujuannya adalah untuk peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas. Selain



itu, upaya pendampingan terus menerus, pemutakhiran data dan standardisasi Tren Ketan Jawa, pendorongan Ijin Operasi Pesantren Inklusi, kerjasama dengan berbagai Lembaga, dan yang terakhir ditahun 2025 ini adalah Penambahan Pilot Project Tren Ketan Jawa.

Keunggulan Ide/Gagasan Gagasan utama TREN KETAN JAWA ini agar masyarakat kelompok rentan mendapatkan pendidikan agama yang setara dengan masyarakat lain tanpa khawatir dengan masalah pembiayaan dilembaga pesantren. Kanwil Kemenag DIY mengharapkan ada prototype terkait pesantren inklusi yang berdayaguna dan berhasil guna di ruang lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana belum dilakukan oleh instansi lain. Kebaharuan dari gagasan pesantren kelompok rentan di lokus inovasi ini adalah Pemberdayaan Holistik: Pendekatan pesantren tidak hanya terbatas pada pendidikan agama dan pendidikan akademik saja, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan hidup, vokasi, dan pendampingan psikososial. Tujuannya adalah memberdayakan kelompok rentan agar memiliki bekal yang komprehensif untuk mandiri dan berkontribusi positif. Pendidikan yang Relevan dan Adaptif: Kurikulum pesantren dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar kelompok rentan, mempertimbangkan latar belakang, potensi, dan tantangan yang mereka hadapi. Metode pengajaran yang fleksibel dan personalisasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penguatan Jaringan Sosial: Pesantren menjadi wadah untuk membangun kembali atau memperkuat jaringan sosial yang positif bagi kelompok rentan. Interaksi dengan sesama santri, ustadz, dan tokoh masyarakat dapat membuka peluang baru dan mengurangi risiko isolasi sosial. Selain



itu, pembangunan jejaring dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, dan dunia usaha. Sinergi ini dapat memperkuat sumber daya dan memperluas dampak positif pesantren. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi : Monitoring dan Evaluasi dirancang untuk mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak pelaksanaan pesantren inklusi ini. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun oleh tim internal Kanwil DIY Bidang PAKIS Kanwil Kemenag DIY. Dalam kurun 2021-2024 sudah ada 11 pesantren inklusi TREN KETAN JAWA ini. Instrumen monitoring dan evaluasi memotret tujuan evaluasi: pencapaian tujuan program, dampak terhadap kesejahteraan santri dan keberlanjutan dan inklusivitas program pesantren. Cara melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif berupa kuisisioner, serta data administratif. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, observasi partisipatif dalam kegiatan pesantren. Indikator dampak inovasi: indikator pendidikan & spiritual seperti peningkatan pemahaman agama, jumlah santri yang menyelesaikan pendidikan, hafalan Al-Quran. Indikator Kesejahteraan & Kemandirian: Jumlah santri yang memperoleh pelatihan ketrampilan, santri yang berwirausaha/bekerja setelah lulus. Indikator Perlindungan dan rehabilitasi sosial: penurunan kasus diskriminasi. Indikator dampak sosial dan ekonomi: jumlah UMKM/kegiatan usaha santri, jumlah kolaborasi dengan mitra, persepsi masyarakat terhadap pesantren.

Dampak :

- a. Output inovasi TREN KETAN JAWA yang dihasilkan oleh kegiatan pesantren kelompok rentan pada lokus



inovasi ini adalah:

ASPEK	BEFORE INOVASI	AFTER INOVASI
Aksesabilitas Fisik	Fasilitas tidak ramah difabel	Jalur kursi roda tersedia, bangunan aksesibel, toilet khusus disabilitas
Kurikulum & Pembinaan	Materi keagamaan belum disesuaikan kebutuhan lansia/disabilitas/ODGJ	Kurikulum adaptif diterapkan pembinaan spiritual dengan pendekatan personal
Pelatihan SDM	Pengasuh pesantren belum memiliki pelatihan inklusi	4 pelatihan diselenggarakan, 80% pengajar memahami pendekatan keagamaan inklusif
Layanan Psikososial	Tidak ada layanan konseling atau kunjungan psikiater	Kunjungan psikiater rutin 2x/bulan, tersedia ruang terapi layanan konseling
Kegiatan Santri Rentan	Lansia dan ODGJ pasif	90% santri rentan aktif dalam ibadah, pelatihan wirausaha & kegiatan harian
Keterlibatan Keluarga	Keluarga jarang dilibatkan dalam proses pembinaan	Diadakan family gathering 3x/tahun
Stigma Sosial	Kurang menerima ODGJ/disabilitas	Edukasi masyarakat dilakukan, tumbuh dukungan terhadap santri
Kemitraan & Kolaborasi	Belum ada	Tercipta kemitraan dengan lembaga, organisasi, relawan

b. Santri, termasuk dari kelompok rentan yang bisa menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan berdaya saing, mengurangi potensi kerentanan sosial yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengganggu keamanan sesuai asta cita ke 2. Pesantren memiliki program pelatihan keterampilan yang disesuaikan untuk santri, mengembangkan unit usaha atau koperasi. Hal ini menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan sesuai asta cita ke 3. Pesantren kelompok rentan berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM dengan memberikan pendidikan formal dan informal kepada individu yang tidak memiliki akses pendidikan reguler, membekali pengetahuan agama, keterampilan hidup, menciptakan SDM yang lebih produktif, berdaya saing, dan



memiliki karakter yang kuat, sesuai asta cita ke 4. Pesantren kelompok rentan mengembangkan unit-unit usaha, memberikan pelatihan kewirausahaan, membekali keterampilan untuk mandiri secara ekonomi, menciptakan lapangan kerja selaras dengan asta cita ke 6. Pendidikan di pesantren, menekankan toleransi, gotong royong, cinta tanah air, meningkatkan kualitas pendidikan berbasis nilai-nilai islam, menguatkan ideologi bangsa dan pembentukan karakter yang luhur sesuai asta cita ke 8.

Upaya Difusi dan Replikasi Inovasi : Dengan konsep dasar pesantren inklusif untuk kelompok rentan yang relatif mudah dipahami dan diadaptasi, informasi mengenai visi, misi dan tujuan pesantren dapat didokumentasikan dan disebarluaskan melalui berbagai media sehingga potensi replikasi sangat tinggi. Gagasan/informasi: Potensi replikasi pesantren kelompok rentan cukup tinggi karena inklusivitas dimana menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan kelompok rentan mudah diterima berbagai kalangan. Gagasan yang fleksibel terhadap konteks lokal dan budaya masyarakat memudahkan replikasi diberbagai wilayah. Komponen teknis: Jika akses sumber daya manusia yang berpengalaman dan terlatih mudah, maka dapat dipastikan potensi replikasi pesantren kelompok rentan ini tinggi ditambah lagi program teknis seperti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dll terdokumentasi dengan baik. Dengan penggunaan teknologi seperti e-learning dan aplikasi pelatihan akan berdampak memperluas potensi repikasi terutama diwilayah dengan akses terbatas. Komponen manajerial: Sistem kelembagaan yang kuat dan pola kemitraan yang terbuka akan sangat



berpotensi untuk adanya replikasi. Kolaborasi dengan LSM, swasta dapat mendukung keberlanjutan dan penyebaran model ke wilayah/instansi lain. Upaya difusi inovasi pesantren kelompok rentan yang telah dilakukan adalah penyusunan dokumentasi tertulis dan visiografis (video, infografis) yang merangkum model pesantren kelompok rentan. Pembuatan dan pengelolaan website serta akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan pesantren, kisah sukses santri, program-program inovatif yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Transfer pengetahuan yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum berkolaborasi atau bekerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan praktisi dan pihak yang terkait sehingga dapat diadaptasi oleh unit kerja atau instansi lain. Memfasilitasi study banding dan kunjungan belajar ke pesantren kelompok rentan ini sehingga dapat berinteraksi langsung dengan pengelola, tenaga pendidik, pendamping dan santri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam untuk kemudian bias diaplikasikan/direplikasi pada instansi atau unit kerjanya. Menyediakan program pendampingan berkelanjutan bagi unit kerja atau instansi yang akan mengimplementasikan pesantren kelompok rentan.

Sumber Daya :

Optimalisasi penggunaan sumberdaya adalah kunci keberhasilan pesantren kelompok rentan. Berikut sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan pesantren kelompok rentan:

a. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pesantren kelompok rentan meliputi bangunan asrama, ruang kelas, tempat beribadah, dapur,



ruang makan, sanitasi, klinik kesehatan, area keterampilan dll. Pada Pesantren Madania, selain ruang asrama, pihak pengelola juga membidik tanah disekitar asrama yang tidak digunakan, untuk digarap sebagai lahan pertanian. Ada juga unit usaha yang kegiatan usahanya dilakukan oleh santri.

b. Sumber Daya Informasi (data yang diperlukan untuk menjalankan inovasi)

Data yang esensial untuk menjalankan pesantren secara efektif meliputi data santri: latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, perkembangan santri. Data program meliputi kurikulum yakni materi pembelajaran agama, umum dan keterampilan. Jadwal kegiatan baik harian, mingguan ataupun bulanan. Protokol penanganan masalah. Modul pelatihan keterampilan yakni materi dan silabus untuk setiap keterampilan. Data keuangan: laporan pemasukan dan pengeluaran. Data SDM: data pengajar, staf dan relawan. Data kemitraan: informasi kontak dan kerjasama dengan lembaga lain.

c. Sumber Daya Manusia

Tenaga pendidik dan pendamping yang kompeten memiliki pemahaman agama yang baik, kemampuan mengajar yang efektif dan sensitivitas terhadap kebutuhan khusus santri, memiliki keterampilan, psikososial dan keahlian yang dapat mendukung kegiatan santri baik dari sisi akademis maupun bidang keterampilan seperti pertanian, kearajinan dan teknologi.



d. Ketersediaan Anggaran

Sumber anggaran pesantren berasal dari donasi individu dan korporasi melalui program CSR. Usaha ekonomi produktif pesantren seperti hasil pertanian, penjualan produk keterampilan santri dan usaha-usaha yang dijalankan. Hibah dari pemerintah, zakat infaq sedekah wakaf bisa juga dengan kemitraan.

Strategi Keberlanjutan :

Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pesantren kelompok rentan:

a. Strategi Institusional

Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No. 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi pendidik/pendamping dalam aspek kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan mendukung hak-hak anak. Kemenag juga sedang menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) yang bertujuan untuk memperkuat struktur kelembagaan pesantren agar mampu mengakomodasi fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk dalam rencana pengembangan struktur kelembagaan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Kemenag dan Kemensos bekerja sama dalam penguatan program sosial keagamaan, termasuk Madrasah Rakyat, untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Pesantren dan madrasah dioptimalkan sebagai alternatif utama dalam program



Sekolah Rakyat, memanfaatkan potensi zakat, wakaf, dan infaq untuk mendukung pendidikan bagi kelompok rentan.

b. Strategi Manajerial

Pesantren perlu mengembangkan unit usaha seperti pertanian, koperasi, atau industri kerajinan tangan. Untuk itu, diperlukan pendekatan sistematis dalam pendidikan kewirausahaan, termasuk manajemen bisnis, inovasi produk, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga lainnya dapat membantu memperkuat program kewirausahaan. Selain itu pesantren perlu memastikan keberlanjutan pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan program. Selain mengandalkan dana dari pemerintah, kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan bisa menjadi alternatif pendanaan yang baik.

c. Strategi sosial

Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi, seperti keahlian teknis, sumber daya keuangan, dan jangkauan masyarakat. Melibatkan kelompok rentan dalam perancangan dan pelaksanaan program untuk memastikan bahwa skema tersebut relevan, responsif, dan berkelanjutan. Memberi program pemberdayaan ekonomi kepada kelompok rentan berupa pelatihan kewirausahaan diharapkan dapat



membantu kelompok rentan mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Penghargaan :

1. Kegiatan Humas Award Tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia berlangsung di Aryaduta Hotel, Senin (1/12/2025) malam. Dalam sambutannya, Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin, M.A., menegaskan bahwa profesi kehumasan adalah profesi mulia yang memiliki dasar kuat dalam ajaran agama. “Jangan memandang enteng profesi humas. Dalam Al-Qur’an ada dua surah, An-Naba dan Al-Qalam yang berkaitan dengan informasi, jurnalistik, dan komunikasi,” ujarnya. Menag juga menjelaskan delapan gaya komunikasi Qur’ani dan mengingatkan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi. “Katakanlah apa adanya. Prestasi bukan untuk disombongkan. Ikhlas beramal adalah kuncinya,” tegasnya. Menag menutup dengan apresiasi mendalam kepada insan humas dan media yang menurutnya setiap hari melakukan jihad kebenaran melalui informasi.

Pada kesempatan yang sama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menerima penghargaan kategori informatif. Kepala Kanwil Kemenag DIY, Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. “Kami berbangga dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini menjadi cambuk dan pelajaran berharga agar ke depan pemberitaan benar-benar informatif bagi masyarakat, termasuk seluruh layanan Kementerian Agama,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini tidak



hanya bentuk apresiasi, tetapi juga amanah untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. “Selamat kepada seluruh tim. Terus berjuang untuk kebaikan di masa yang akan datang,” ujarnya.



2. Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih hattrick alias tiga penghargaan nasional sekaligus pada ajang Harmony Award Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam. Tiga penghargaan tersebut adalah Peringkat II Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY sebagai Penggerak Terbaik Kerukunan Kementerian Agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY sebagai peringkat III Kinerja Terbaik Nasional. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Kakanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej, dan Ketua FKUB DIY Prof. Machasin. Turut hadir dari DIY Kepala Badan Kesbangpol DIY Lilik Andi Aryanto.



Wagub KGPAA Paku Alam X menilai, prestasi ini merupakan bukti kerjasama sinergitas yang baik antara Pemda, Kemenag dan FKUB DIY. “Ini merupakan prestasi kita bersama,” tandasnya ditemui di sela kegiatan.

Ahmad Bahiej menjelaskan, program inovasi yang digulirkan seperti Livin Pelajar Lintas Agama, juga dukungan publikasi saat Delegasi Austria yang tergabung dalam program Indonesian Interfaith Scholarship (IIS) berkunjung di Yogyakarta beberapa waktu lalu, ternyata dinilai berhasil oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI.





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil (result oriented government) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian indikator kinerja tahun berjalan mencapai **103,52%** atau **SANGAT BAIK** dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi seluruh unit kerja, penguatan fungsi perencanaan dan penganggaran, serta komitmen pimpinan dan pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi, Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan pembenahan pada delapan area perubahan, khususnya dalam penguatan manajemen kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan tata laksana, serta penguatan pengawasan internal.



Implementasi Reformasi Birokrasi tersebut diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus diperkuat melalui:

1. Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai.
2. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian gratifikasi.
3. Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas layanan berbasis standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi layanan.

Walaupun capaian kinerja telah melampaui target, evaluasi tetap dilakukan secara berkelanjutan guna mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi kualitas output, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta penguatan budaya kerja yang berintegritas.

Secara umum, capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta atas sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang **SANGAT BAIK**, terlepas dari masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan yang perlu mendapatkan perhatian.

Beberapa strategi yang perlu dilakukan agar seluruh sasaran dan indikator kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai minimal sesuai target yang telah ditetapkan, maka perlu adanya langkah-langkah kongkrit antara lain:



1. Menerapkan manajemen resiko kinerja dengan melakukan indentifikasi, analisis dan pengendalian resiko kinerja;
2. Menyusun strategi pencapaian kinerja (rencana aksi kinerja) setiap awal tahun anggaran atas perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun mendatang;
3. Menyusun dan melaporkan capaian kinerja secara berkala baik triwulanan maupun tahunan tepat waktu; dan
4. Melakukan monitoring atas capaian kinerja satuan kinerja di bawahnya secara berkala.

Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal mencapan tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, mampu mendorong perkembangan dan reformasi organisasi.

Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025. Laporan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan tahun pertama dalam merefleksikan pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa



Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dijadikan salah satu acuan dalam proses perencanaan selanjutnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita semua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Bahiej
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I.Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kamaruddin Amin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Kamaruddin Amin

Jakarta, 22 Desember 2025
Pihak Pertama,

Ahmad Bahiej

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI D.I YOGYAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Vol	Satuan
1.	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	83,20	
		2. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	19,00	%
		3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	25,00	%
		4. Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi/Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha	7,50	%
		5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya	2,00	%
		6. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	25,00	%
2.	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	85,00	%
		2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 : 8	
		3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	72,00	%
		4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	12,50	%
		5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	1,50	%
		6. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana	30,00	%

		prasarana peribadatan		
		7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	76,00	%
		8. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	5,50	%
		9. Jumlah buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	7,00	
		10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	80,00	%
		11. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	2,50	%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	90,00	%
		2. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	95,00	%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	95,00	%
		2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	85,00	%
5.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	85,00	%
		2. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	95,00	%
6.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A)		
		a. Lembaga penyelenggara haji khusus	80,00	%
		b. Lembaga penyelenggara umroh	80,00	%
7.	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	55,00	%
8.	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan	1. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama,	1,50	%

	pendidikan keagamaan yang berkualitas	satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif		
		2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	1,00	%
		3. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	1,25	%
		4. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	95,00	%
		5. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	75,00	%
		6. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	95,00	%
9.	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk : a. literasi membaca b. numerasi	70,00 65,00	
		2. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	85,00	%
		3. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	90,00	%
		4. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	150,00	
		5. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	1,50	%

		6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	80,00	%
		7. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	80,00	%
		8. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	5,00	%
		9. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	2,50	%
		10. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1,00	%
		11. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	75,00	%
		12. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	85,00	%
10.	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	85,00	%
		2. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : 30	
		3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	75,00	%
		4. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	80,00	%
		5. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	85,00	%
		6. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	80,00	%

		7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	78,00	%
		8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	85,00	%
		9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	60,00	%
		10.	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	75,00	%
		11.	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	25,00	%
		12.	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	75,00	%
11.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran		95,00	
12.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	95,00	%
		2.	Persentase satker dengan nilai Pembangunan ZI diatas 75	75,00	%
13.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95,00	
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	75,00	%
		3.	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	95,00	%
		4.	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	20,00	%
		5.	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	90,00	%
14.	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	1.	Indeks Profesionalisme ASN	72,00	
		2.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan	90,00	%

		SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan		
		3. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif	35,00	Orang
15.	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80,00	%
		2. Persentase rekomendasi izin orang asing	85,00	%
16.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	80,00	%
		2. Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	80,00	%
		3. Nilai Layanan Kesehatan	80,00	
17.	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	80,00	
		2. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	4,50	%
18.	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Indeks Pembangunan Statistik	67,00	
		2 Persentase data statistik yang dipublikasi	75,00	%

Program dan Kegiatan

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Anggaran (ribuan)

Rp. 26.496.047

a. Kegiatan Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Rp. 11.853.455
b. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp. 725.100
c. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp. 6.390.000
d. Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp. 1.211.000
e. Kegiatan Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	Rp. 64.320
f. Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	Rp. 24.000
g. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Rp. 898.000
h. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	Rp. 1.672.238
i. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	Rp. 1.489.000
j. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	Rp. 584.120

k. Kegiatan Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp. 135.580
l. Kegiatan Pembinaan Haji	Rp. 191.694
m. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Rp. 1.257.540
2. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 62.700.882
a. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Rp. 490.000
b. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	Rp. 61.654.562
c. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Rp. 26.520
d. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	Rp. 454.800
e. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	Rp. 75.000
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 55.868.056
a. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	Rp. 11.307.322
b. Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Rp. 40.993.488
c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	Rp. 1.395.000
d. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	Rp. 632.746
e. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	Rp. 908.000
f. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	Rp. 513.000
	Rp. 642.711.384
4. Program Dukungan Manajemen	Rp. 71.500
a. Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Rp. 443.810
b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 129.474.292
c. Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Rp. 239.555
d. Kegiatan Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 391.135
e. Kegiatan Pembinaan Administrasi Perencanaan	Rp. 14.672.983
f. Kegiatan Pembinaan Administrasi Umum	Rp. 170.003
g. Kegiatan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	Rp. 5.403.599
h. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp. 15.534.279
i. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 75.000
j. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	Rp. 317.541
k. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	Rp. 309.400
l. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	Rp. 7.500
m. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	

Teknis Lainnya Bimas Budha	Rp. 2.789.605
n. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 245.000
o. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	Rp. 279.715
p. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	Rp. 270.000
q. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	Rp. 472.016.467
r. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan	

Jakarta, 22 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi D.I Yogyakarta,



Sekretaris Jenderal,

Kamaruddin Amin

bahej

Ahmad Bahlej



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 453 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perlu disusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
b . bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusun;
c . bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang



Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun LKj adalah :

1. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
2. Melakukan analisis terhadap capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Mengolah data dan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Mendokumentasikan data dan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Melaporkan hasil analisis akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 26 Juni 2025
KEPALAKANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 453 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

- Penanggungjawab : Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Koordinator : H. Muntolib, S.Ag, M.S.I
Ketua : Anas Effendi, S.M
Sekretaris : Eko Putro Doreri, S.Kom
Anggota : 1. Dini Meiyanti, SE.,M.Si
2. Ngaisah,SE.,MAB
3. Yunny Astuti, SE
4. Yuwanita Wahyudi, SH
5. Fatakhul Huda, S.E
6. Findita Dewi Setiasari, S.Psi, M.A
7. Joko Triyanto Nugroho, SE
8. Vennawatie Yenny Astutie, S.H
9. Kurnia Wulandari, S.Si
10. Brama Aji Putra, S.Kom.I
11. H. Moh Ridwan Afandi, S.H.I
12. Eka Putri Evriyanti, SE
13. Endri Susilowati, SE
14. Maslakhah, S.Ag
15. Aziz Shahroni, SH
16. RBG. Bambang Wisnu Broto, S.Pd
17. Christina Sarmini
18. Sudaryanto,S.P
19. Hari Gunarto, SE
20. Noer Faidah Maharini, S.Ag, M.S.I
21. Ahmad Kurnia Anshorudin, S.Kom
22. Tyas Wening Damayanti, SE
23. Muguh Danu Murwantono, SE
24. Muzayin Helmy, SH

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ

